

## **Interaksi Seni Pertunjukan Wayang dan Politik**

Oleh: Jaka Rianto, S.Kar., M.Hum.

### **Abstract**

The article entitled “Wayang and Politics: the Interaction of Shadow Play with the Power System” discusses the intervention of the authority in puppet theatre. The intervention has begun since there was an understanding that art could be a medium for practical purposes. Based on the fact, this article aims to explain the problems of how the power system intervenes wayang theatre and what the wayang paradigm in the Indonesian power system is like. Based on the analysis on political system dimension, the result of the research showed that to make the art development free from the intervention of the authority was hard to realize. Wayang theatre, indeed, can be used as the frame of the behaviour of the authority. We can see, for instance, that politicians are analogous to wayang; there is a belief that wayang ruwatan (an act of exorcism) performance aims at making a certain political party win.

Key words : wayang performance, politics, power

### **Pengantar**

Seni pewayangan [baca; seni pertunjukan wayang] merupakan produksi masyarakat yang dikonsumsi pula bagi masyarakatnya. Ini artinya seni tersebut lahir dan berkembang di masyarakat yang dilingkupi oleh berbagai sistem sosialnya. Sistem sosial ini sangat mempengaruhi bahkan membingkai bentuk kreativitas seni pertunjukan wayang sehingga seolah-olah ada tarik menarik yang sangat kuat antara sistem tersebut dengan eksistensi seni pewayangan. Di satu pihak, seni pewayangan ingin menempatkan diri pada pencerahan jiwa manusia yang mendalam - sebagai fungsi primer - di lain, pihak sistem sosial memanfaatkan seni pewayangan sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dapat kita lihat pada jalur sistem politik kekuasaan.

Berdasarkan dua klasifikasi fungsi seni pewayangan tersebut nampaknya fungsi yang kedua – sekunder – lebih mendapatkan perhatian dari para pengkaji maupun kritikus seni sebagai wacana kesenian. Hal ini disebabkan karena fenomena yang ada dalam masyarakat cenderung memanfaatkan seni pewayangan untuk kepentingan tertentu yang bukan hayatan sifatnya. Misalnya mengkaitkan

seni pewayangan sebagai alat dakwah, pendidikan-penerangan, pencarian ekonoini, dan alat propaganda politik. Usaha memanfaatkan seni pewayangan untuk tujuan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki legitimasi publik yang sangat besar.

Pada dasarnya, pihak elite penguasa ingin mencapai tujuan dengan cara yang sangat praktis, yakni mempergunakan media wayang--yang merupakan salah

satu seni pertunjukan yang digemari masyarakat Jawa - untuk mempercepat pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat segmen menengah ke bawah. Inti dari pembicaraan ini mengindikasikan adanya keterlibatan dalang terhadap praktik perpolitikan yang dilakukan para elite penguasa. Artinya bahwa dalang telah terkooptasi oleh kemauan para penguasa, sehingga menjadikan dirinya sebagai penyambung lidah legitimator kepada publik perihal pesan-pesan tertentu.

Adanya keterkaitan antara seni pewayangan dengan sistem kekuasaan secara sosiologis dapat dikatakan sebagai bentuk interaksi sosial. Ini artinya ada hubungan timbal balik antara keduanya, yang memberikan konsekuensi - konsekuensi tertentu, baik bagi pertumbuhan dan perkembangan seni pewayangan maupun bagi keberlangsungan sistem kekuasaan.

Atas dasar gejala tersebut, maka sudah saatnya dilakukan suatu pengkajian yang komprehensif terhadap interaksi antara seni pewayangan dengan sistem kekuasaan. Hal ini didasarkan atas berbagai alasan yaitu: pertama, tulisan ini akan memberikan gambaran yang urgen tentang intervensi sistem kekuasaan terhadap seni pewayangan serta paradigma seni pewayangan dalam sistem kekuasaan negara kita. Kedua, tulisan dengan perspektif sosiologis tentang seni pewayangan belum begitu banyak dijumpai, sehingga ada ketertarikan untuk mencoba mengungkapkan dalam bentuk paper ini. Dari pertimbangan itu, maka tulisan ini diberi judul "Seni Pewayangan dan Sistem Kekuasaan".

Tujuan utama dari tulisan ini adalah ingin memberikan gambaran tentang hubungan timbal balik antara seni pewayangan dan sistem kekuasaan sehingga dapat diketahui dengan jelas bagaimana sistem kekuasaan berpengaruh terhadap

seni pewayangan baik wujud maupun isinya. Disamping itu diketahui pula tentang paradigma wayang dalam sistem kekuasaan negara, baik yang menyangkut sistem birokrasi maupun behavior manusianya.

Tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berharga baik bagi pelaku seni, elit penguasa, maupun sebagai kajian ilmiah. Para pelaku seni, khususnya dalang akan mendapatkan perspektif yang jelas tentang cara

mendudukan posisinya dalam kancah perpolitikan negara. Bagi elit penguasa dapat dijadikan cermin agar tidak gegabah menggunakan seni pewayangan sebagai “corong” untuk mencapai tujuan pragmatismenya. Sebagai kajian ilmiah, karena di dalamnya akan diungkapkan variable gejala yang dapat ditangkap dari interaksi seni pewayangan dengan sistem kekuasaan.

Berangkat dari rasionalitas di atas, dapat ditemukan permasalahan yang sangat urgen untuk dijabarkan secara rinci yaitu :

1. Bagaimana intervensi sistem kekuasaan dalam seni pewayangan?
2. Bagaimana paradigma wayang dalam sistem kekuasaan di Negara Indonesia?

Dua permasalahan ini menjadi titik tolak dalam langkah pembahasan lebih lanjut.

#### *Intervensi Kekuasaan dalam Seni Pewayangan*

Seperti kita ketahui bahwa sistem kekuasaan sangat berpengaruh terhadap kehidupan seni pewayangan. Hal ini dapat berlangsung pada kurun waktu yang sangat panjang, yakni dari zaman kerajaan sampai dewasa ini. Campur tangan yang kuat dari pihak penguasa terhadap seni pewayangan dapat dilihat dari inisi yang disampaikan yakni bermuatan pesan-pesan politik penguasa. Konsekuensi logis dan gejala ini adalah mengakibatkan perubahan yang sangat besar pada tubuh kesenian itu sendiri, inisalnya dalam hal wujud seni selalu terjadi degradasi yang sangat kentara, baik wujud artistik maupun *message*-nya.

Kekuasaan (*power*) merupakan unsur pokok dari politik, selain *state*, *decisionmaking*, *policy*, dan *distribution*. Kekuasaan ini diartikan sebagai

kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Iniriam Budiardjo 1972:9 - 10). Aktivitas mempengaruhi ini dapat dilakukan dalam berbagai hal yang berhubungan dengan masyarakat dan hasil budayanya. Salah satu hal penting yang

terkait dengan kepentingan kekuasaan yakni dalam seni pewayangan dan kesenian lain pada umumnya.

Seni pewayangan merupakan hasil budaya masyarakat yang selalu lekat dengan masyarakatnya pula. Ini artinya bahwa seni tersebut selalu terbingkai dalam sistem budaya masyarakatnya. Salah satu sistem budaya yang berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat adalah sistem kekuasaan atau sistem politik. Seperti dikemukakan Umar Kayam bahwa sistem kekuasaan merupakan suatu sistem yang paling berpengaruh bahkan membawahi dari berbagai sistem sosial yang menggerakkan dinainika masyarakat termasuk dalam seni pertunjukan wayang (1999:1). Apabila dicermati ternyata sistem kekuasaan merupakan frame besar yang membingkai sebuah negara, dimana seni pewayangan hidup dan berkembang di dalamnya.

Intervensi sistem kekuasaan terhadap seni pewayangan telah berjalan sejak masa kerajaan. Pada zaman kerajaan Islam, seni pewayangan dipakai sebagai alat dakwah oleh para penyebar agama Islam. Sunan Kalijaga memanfaatkan seni pewayangan untuk menarik masyarakat agar berbondong-bondong masuk Islam. Apa yang dilakukan Sunan Kalijaga ini sangat strategis, karena pada masa itu salah satu bentuk seth pertunjukan yang digemari masyarakat dan menghadirkan masyarakat banyak adalah seth pewayangan, sehingga cara ini dirasakan sangat efektif untuk menyampaikan tujuannya.

Masa kerajaan Surakarta, wayang dipakai sebagai alat legitimasi raja. Bukti dari intervensi ini terlukis jelas pada *janturan jejer* (deskripsi dalang pada adegan pertama) yang selalu mengungkapkan keadaan negara persis dengan keadaan Kraton Surakarta yang senyatanya. ini artinya bahwa seni pewayangan

telah disusupi pesan-pesan yang jelas dari pihak penguasa untuk tujuan legitimasi. Hal yang sangat kentara dari bentuk campur tangan penguasa pada seni pertunjukan wayang yaitu tercermin dalam lakon wayang yang selalu menggambarkan tokoh-tokoh raja dan ksatria sebagai pemegang peranan kehidupan, sedangkan lakon-lakon kerakyatan hampir tidak pernah muncul pada saat itu. Lakon *Wahyu*

*Makutarama, Wahyu Cakraningrat* dan lain-lain jika kita lihat pada isinya sangat terkait erat dengan usaha melegitimasi diri dari para penguasa kerajaan.

Pada masa penjajahan, para penguasa wilayah - seperti raja dan bupati, mempergunakan wayang sebagai alat untuk mengobarkan semangat perjuangan rakyat walaupun secara simbolik sifatnya. Hal ini dapat dilihat pada adegan dalam bangunan lakon wayang, seperti perang antara Sarapada dengan Celeng atau Macan. Peperangan ini menyiratkan maksud bahwa ada usaha orang Jawa - yang disimbolkan Sarapada - melawan Belanda - yang disimbolkan Celeng atau Macan. Bahkan sebelumnya bentuk pengorbanan semangat perjuangan ini lebih wantah, yakni perang antara tokoh Sarapada melawan tokoh Tentara Belanda, karena ada protes keras dari penonton Belanda sehingga pihak dalang menggantinya dengan tokoh simbolik berjudul Celeng atau Macan (Wawancara Naryo Carito 15 Oktober 2001). Darsiti Soeratman melukiskan bahwa simbol peperangan antara orang Jawa melawan Belanda dapat dilihat pada upacara *rampogan*, yakni adu banteng melawan harimau, yang pada akhirnya harimau mati dirajam prajurit yang mengelilingi arena tersebut (1998:165). Pernyataan ini juga sejalan dengan I Nyoman Murtana dkk., yang mengatakan bahwa sesungguhnya ornamen dalam wayang kulit yaitu *Kayon Gapuran* bergambar Banteng dan Harimau itu menggambarkan sikap perjuangan PB II melawan Belanda (1998:25).

Kondisi seni pewayangan pada tahun 1960-an diwarnai dengan persaingan antar partai politik besar yang ada di Indonesia. Akibatnya para dalang dan juga seni pewayangannya menjadi terkotak-kotak dalam payung partai politik.

Hal ini bukan diakibatkan oleh pengaruh ekonomi pasar, tetapi lebih diakibatkan oleh adanya intervensi politik. Sedikitnya ada dua kandang partai politik dimana dalang bernaung dan menyampaikan propaganda politik lewat pertunjukan wayang, yaitu LKN [Lembaga Kebudayaan Nasional] di bawah bendera PNI dan LEKRA [Lembaga Kebudayaan Rakyat] di bawah naungan PM. Itulah sebabnya para dalang yang berdiri netral dan tidak mau terlibat dalam partai politik terpaksa jarang mendalang, sehingga kreativitas dalang semakin beku (Rustopo 1998:48; Bambang Murtiyoso, dkk. 1998:29).

Era Orde Baru, banyak kegiatan elite penguasa yang menggunakan jasa dalang dan pewayangannya untuk tujuan propaganda pemerintah. Hal ini dapat kita ketahui semenjak Repelita I, yang mana pertunjukan wayang telah dititipi pesan-pesan pembangunan oleh para pejabat ORBA. Kaum birokrat penguasa dan tingkat pusat sampai tingkat desa telah berusaha memanfaatkan para dalang untuk menyampaikan pesan pembangunan atau program pemerintah dalam berbagai kesempatan pentasnya. Bagi pejabat yang mengetahui dan mengenal cara-cara kreatif dalam penyampaian pesan pemerintah itu bukan masalah karena dalang yang kreatif memiliki kepekaan sosial yang tinggi dalam mengungkapkan persoalan kemanusiaan lewat seni pewayangannya. Akan tetapi sebagian besar para pejabat yang tidak apresiatif terhadap seni wayang dan kebetulan menyerahkan tugasnya kepada dalang yang tidak kreatif akan menimbulkan degradasi dan pendangkalan bentuk ekspresi pertunjukan wayang (Bambang Murtiyoso, dkk. 1998:37 - 38).

Intervensi pemerintah yang sangat tajam dapat diketahui pada tahun 1980-an, ketika Indonesia akan mengadakan pemilihan umum 1987. Ketika itu Nartasabda dan Anom Suroto menjadi bahan gunjingan masyarakat karena mementaskan lakon "Waringin Kencana" yang ditayangkan TVRI Pusat Jakarta secara nasional (Bambang Murtiyoso 1999:43). Waringin Kencana [Beringin Emas] agaknya sengaja dibuat untuk kepentingan pemilu, karena judul lakon tersebut menunjukkan hubungan dengan lambang Golkar, yaitu pohon beringin.

Oleh sebab itu pergelaran tersebut dipandang sebagai dukungan terbuka terhadap kampanye partai pemerintah (Gronendael 1987:201). Pada acara Sarasehan Dalang Seluruh Indonesia di Jakarta tahun 1986, pada sambutan akhir Ketua DPP Golkar secara tersurat mengajak para dalang untuk aktif mensukseskan kemenangan Golkar, seperti pernyataan berikut:

Kepada para dalang yang sekarang ini sedang mengikuti sarasehan maupun yang tak sempat hadir dalam pertemuan yang berbahagia ini, kami sangat mengharapkan untuk ikut berjoang bersama-sama GOLKAR memenangkan PEMILU 1987 (Senawangi 1986:44).

Pada dekade 90-an, Gubernur Jawa Tengah beserta para bawahannya mencanangkan program “Golkar Sukses” dengan gerakan kuningisasi yang diungkapkan dalam pertunjukan wayang dengan sukses pula. Pada waktu itu muncul wayang dua kelir dengan atribut warna kuning, mulai dari dialog dalang, kursi, karpet serta pakaian para dalang dan kru-nya (Bambang Murtiyoso 1999:43). Apa yang dilakukan penguasa Jawa Tengah ini merupakan upaya untuk menyampaikan program Golkar bagi masyarakatnya, yang mana dapat dikatakan sebagai upaya yang tidak melalui perenungan yang matang.

Dalam rangka mengokohkan jati dirinya, Presiden Soeharto menggunakan symbol seni pewayangan sebagai legitimasi diri. Hal ini dapat dibuktikan pada keinginannya agar para dalang membuat lakon baru. Pada saat Rapat Paripurna PEPADI tahun 1995 di Jakarta, mengatakan sebagai berikut:

Karena itu sebetulnya kita perlu menciptakan suatu *lakon*..... *lakon* yang dipilih itu harus yang merakyat, bukan lakon tentang raja-raja. Dalam lakon itu rakyatlah yang berperan besar dan, dengan sendirinya, hanya Semarlah yang bisa berperan demikian. Misalnya *lakon* “Semar mbabar jatining pribadi” atau “jatining kawula” atau “jatining manungsa” itu yang cocok. Untuk itu perlu diciptakan lakon khusus (Cempala 1995:11).

Atas dasar instruksi Presiden itu, kemudian lahir lah lakon Semar Mbabar Jati diri yang kemudian secara simultan dipertunjukan di berbagai daerah di Indonesia, baik oleh dalang populer maupun dalang lokal. Apabila dicermati dengan seksama lakon ini mengetengahkan sejarah perpolitikan Indonesia yang

dikemas dengan baik sekali. Pesan pemerintah dan peristiwa politik tidak secara *mloho* diketengahkan, namun dalam bentuk-bentuk simboliknya. Namun demikian, *lakon* tersebut jelas-jelas merupakan alat bagi Presiden untuk mengukuhkan kebenaran sejarah perpolitikannya.

Lintasan peristiwa di atas mewarnai pertumbuhan dan perkembangan seni pewayangan. Apabila kita lihat dari pertumbuhannya, seni pewayangan mengalami zaman keemasan, terutama pada tahun 1980-an. *Booming* wayang ini dapat kita saksikan pada berbagai even pribadi, kelompok, dan lembaga pemerintah. Pertumbuhan seni pewayangan juga dapat kita ketahui dari munculnya aneka warna pertunjukan wayang dengan nuansa yang berlainan, baik politik, ritual, hiburan, sehingga pertumbuhan dalangpun melaju sangat pesat. Namun demikian apabila dicermati dari perkembangannya, banyak terjadi degradasi dalam tubuh seni pewayangan, terutama yang dilakukan oleh para dalang yang telah terkooptasi berbagai kepentingan di luar pewayangannya. Kemunduran dari perkembangan wayang akibat dari intervensi kekuasaan terutama pada masa ORBA dapat disimak dari fenomena makro sebagai berikut (1) banyak dalang yang telah meninggalkan paugeran (kaidah estetika dan etika) demi kepuasan materi; (2) pemerintah ORBA memberi keleluasan para dalang untuk meraih kepuasan materi, akan tetapi dibalik itu sesungguhnya memiliki kepentingan politis yang mengekang kreativitas dalang (3) kreativitas tidak berjalan baik, tetapi sensasi yang jauh meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan yang menggejala di tubuh pewayangan; (4) keberadaan organisasi pewayangan tidak lain sebagai alat kontrol dan penyalur kepentingan politis; (5) seni pewayangan lebih dipandang sebagai alat dan komoditi daripada asset kebudayaan (Tim Kerja Dalang 1998:1 - 2).

Akibat campur tangan kekuasaan pada kesenian termasuk seni pewayangan yang paling tragis adalah dengan adanya pelarangan yang dilakukan oleh pemerintah ORBA yang justru menimbulkan gerakan spontan yang dilakukan seniman untuk memperjuangkan HAM. Para seniman mendakwa



adanya pelarangan yang menyangkut kesenian disebut sebagai tindak pemasungan kreativitas (Ikranagara 1993:12). Terjadi kejanggalan karena kreativitas sebagai dasar berkembangnya seniman dipasung, sementara indoktrinasi dan sloganisme yang bisa menimbulkan apatisme justru dibiarkan

semarak menjadi retorika politik dan retorika penguasa (Soediro Satoto 1999:67). Permasalahan pelarangan dan ijin pentas banyak dialami oleh para dalang, terutama yang tidak bersedia menjadi “corong” penguasa atau dianggap membahayakan legitimasi ORBA. Kasus yang nyata-nyata terjadi, seperti yang dialami oleh Tristuti Rachmadi Suryosaputro, ketika akan pentas di suatu hajatan tertentu dilarang oleh pihak keamanan dengan alasan membahayakan masyarakat Hal ini didasarkan pada alasan bahwa Tristuti dikategorikan sebagai tokoh eks Partai Komunis Indonesia yang jelas-jelas menjadi lawan politik ORBA. Menurut Gronendael, kejadian-kejadian sebelum dan sesudah Gerakan 30 September telah merusakkan hubungan timbal balik antara dalang dan pemerintah. Kewajiban melapor pada tiap pementasan wayang terutama dipandang oleh para dalang sebagai pelanggaran tindak semena-mena terhadap kebebasan bergerak. Mereka memandangnya sebagai suatu pertanda kecurigaan yang benar-benar bertentangan dengan kehormatan kedudukan dalang yang sejak dahulu eksist di masyarakat (1987:220).

#### *Paradigma Wa yang dalam Sistem Kekuasaan*

Paradigma dapat dimaknai sebagai pola pikir ataupun jendela pandang bagi manusia terhadap obyek yang dijadikan sarannya. Paradigma wayang dalam system kekuasaan dapat berarti pola pikir dalam seni pewayangan untuk melihat system kekuasaan. Berdasarkan pemahaman ini, perlu diungkapkan adanya paradigma wayang dalam system kekuasaan yang meliputi berbagai hal, seperti ajaran-ajaran dalam wayang, struktur birokrasi wayang, karakteristik tokoh, dan fungsi ritual wayang bagi masyarakat

Seperti diketahui bahwa wayang merupakan cerminan masyarakat, karena hal-hal yang diungkapkan dalam *lakon* adalah gambaran kenyataan hidup manusia. Maka tidak berlebihan apabila ajaran-ajaran dalam seni pewayangan banyak mempengaruhi perilaku masyarakatnya. Dalam paradigma wayang,

sistem kekuasaan kita banyak mengacu pada ajaran yang disampaikan dalam pewayangan. Hal ini dapat kita ketahui dari ajaran *hastabrata* dalam *lakon Makutarama*. Ajaran ini dianut para pemimpin kita, mulai Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati sampai Kepala Desa terutama yang berbasis budaya Jawa. Dalam *hastabrata* dikenal beberapa pedoman kepemimpinan yang mengacu pada unsur-unsur alam, seperti *kisma*, *tirta*, *samodra*, *samirana*, *candra*, *surya*, *dahana*, *kartika*. Unsur-unsur alam ini dimaknai masyarakat Jawa sebagai frame tingkah laku kepemimpinan (Seno Sastroamidjojo 1964: 106- 107).

Struktur birokrasi negara yang berbelit-belit dapat juga disamakan dengan struktur dalam wayang, yang dikenal sebagai pucuk pimpinan [adalah raja], patih, menteri, wedana, bupati, lurah dan lain-lain. Hal itu apabila disejajarkan dengan struktur birokrasi Indonesia, maka memiliki kemiripan yang sangat menonjol. Aturan birokrasi pun sangat pelik dan rumit, misalnya orang yang akan menghadap raja [presiden], maka harus melalui tahapan yang sangat banyak.

Dalam wayang, seringkali menampilkan tokoh raja dan ksatria pada setiap *lakon* yang dipentaskan. Sedangkan tokoh rakyat jelata sebagai pemegang peran sangat jarang ditampilkan. Ini artinya bahwa wayang memberikan peranan yang besar bagi para priyayi untuk menguasai rakyatnya (Laksono 1985:23). Bentuk legitimasi dalam wayang ini juga tercermin pada tatanan kehidupan negara kita, yaitu ketika para elite penguasa selalu tampil sebagai orang yang mengambil peranan besar dalam kehidupan bernegara, sedangkan rakyat jelata hanya dijadikan objek belaka.

Analogi tokoh wayang dalam perpolitikan negara dapat kita jumpai pada masa kekacauan politik tahun 1960-an. Pada waktu itu, Soebandrio dikatakan

sebagai Durna-nya Partai Komunis Indonesia. Bahkan sampai sekarang masyarakat masih menjuluki tokoh politik kita dengan nama wayang, seperti A itu identik dengan Sengkuni; Suharto pada masa kemundurannya dijuluki sebagai Rahwana, dan lain-lain. Ini artinya begitu melekatnya seni wayang bagi masyarakat kita, sehingga kejelekan tokoh politik tertentu disamakan dengan tokoh jelek dalam wayang.

Fungsi ritual pertunjukan wayang masih dipercaya para elite penguasa untuk tujuan yang berhubungan dengan kancah politik. Hal ini sangat jelas apabila dilihat pada upacara ruwatan untuk tujuan politik kekuasaan. Seremonial ruwatan dengan pertunjukan wayang telah dilakukan oleh elite penguasa, yakni pada tahun 1998 ketika krisis ekonomi melanda negara Indonesia, Presiden Suharto melalui Menparpostel Joop Ave memerintahkan para dalang untuk mengadakan *ruwatan* dengan *lakon Rama Tambak*. Menurut Anom Sukatno, *ruwatan* juga dilakukan untuk keperluan memenangkan parpol tertentu pada pemilihan umum. Hal ini seperti yang dilakukan Megawati Soekarnoputri yang mengundang Ki Warsono untuk mementaskan *lakon ruwatan* dengan tujuan agar PDIP memenangkan pemilu 1999. Pada tahun 2000 Presiden RI ke IV, Abdurrachman Wahid mengadakan *ruwatan* di Gedung Wayang TMII dengan dalang Ki Manteb Soedharsono, dengan istilah ruwatan keluarga dan negara untuk tujuan supaya negara RI tetap tenteram dan suhu politik bisa mereda. Tahun 2001, Megawati mengadakan *ruwatan* dengan mengundang dalang Manteb Soedharsono untuk tujuan agar Megawati menjadi presiden. Selanjutnya Manteb Soedharsono juga melakukan *ruwatan* atas permintaan Habil Marati dan keluarga PPP (19 Juli 2001) agar posisi PPP dapat sesuai dengan apa yang mereka inginkan (2001:9).

Atas dasar peristiwa di atas, jelaslah bahwa paradigma wayang banyak terdapat dalam sistem kekuasaan negara kita. Ini artinya ada korelasi yang signifikan antara wayang dan sistem kekuasaan. Maka tidak aneh apabila dikatakan bahwa seni pewayangan memiliki relevansi yang kuat dengan sistem

kekuasaan. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang dapat saling mempengaruhi satu sama lain.

### **Penutup**

Intervensi penguasa pada seni pewayangan telah berjalan sejak munculnya kesadaran bahwa seni dapat dijadikan sebagai “corong” untuk tujuan praktis. Tujuan ini sangat beragam sesuai dengan kemauan penguasa, sehingga sudah selayaknya menjadi tantangan bagi pelaku seni dalam menyikapi kemauan penguasa ini. Pada umumnya kesadaran terhadap pengembangan seni agar terbebas dari campur tangan penguasa sangatlah sulit, karena sistem kekuasaan merupakan sistem yang membawahi segala sistem sosial masyarakat suatu negara.

Konsekuensi logis dari adanya intervensi ini mendangkalkan kreativitas berkesenian. Hal itu dapat dimaklumi karena tidak semua pejabat dan dalang memiliki daya kreativitas yang tinggi. Pada umumnya mereka berbekal pada pedoman asal laku dan dimaui pasar, atau bahkan karena terpaksa meladeni sang penguasa. Hal yang sangat menyedihkan adalah manakala terjadi pelarangan pentas bagi dalang tertentu dengan alasan yang kurang dapat diterima, atau pun ijin pentas yang sangat sulit di daerah tertentu. Pemasungan kreativitas itu sangat bertentangan dengan HAM seniman untuk mengembangkan sumber daya manusianya terutama dalam berkesenian.

Dibalik intervensi penguasa, sesungguhnya wayang dapat dilihat sebagai bingkai dari tingkah laku kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari analogi tokoh politik dengan wayang, sistem birokrasi berliku-liku seperti dalam wayang, bahkan kepercayaan mengadakan pertunjukan wayang untuk tujuan tertentu

seperti kemenangan partai politik dalam pemilu, mengobati krisis ekonomi bangsa, meredakan suhu politik yang memanas, dan sebagainya.

### Referensi

- Bambang Murtiyoso, 1999, "*Kesenian Dalam Rangka Kenapa Tidak. . .*", dalam Gelar, Vol 2 No 1, Surakarta: STSI Press.
- Bambang Murtiyoso, Waridi, Suyanto, Harijadi TP, dan Kuwato, 1998, "*Pertumbuhan dan Perkembangan Seni Pertunjukan Wayang*". Laporan Penelitian SENAWANGI dan STSI Surakarta.
- DPH SENAWANGI, 1996, "*Pemasyarakatan Wayang*" dalam *Cempala*, Edisi Bima, Jakarta: Senawangi.
- Gronendael, Victoria Maria Clara van, 1987, *Dalang Dibalik Wayang*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- I Nyoman Murtana, Sunardi, Putut Gunawan, dan Sumardji, 1998, "*Konsepsi Kekuasaan Paku Buwana II dalam Kayon Bergambar Banteng dan Harimau: Sebuah Rekonstruksi Budaya*", Laporan Penelitian STSI Surakarta.
- Ikranegara, 1993, "*HAM dan Seni di Indonesia*" dalam Horison, Nomor: 12 Tahun XXVIII, Edisi Desember 1993, Jakarta: Yayasan Indonesia.
- Laksono, P.M., 1985, *Tradisi dalam Struktur Masyarakat Jawa: Kerajaan dan Pedesaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Miriam Budihardjo, 1971, *Dasar-dasar limit Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Rustopo, 1998, "*Peran Dalang di Era Reformasi*", dalam Gelar, Nomor 1 Tahun Surakarta: STSI Press.
- SENAWANGI, 1986, *Sarasehan Dalang Seluruh Indonesia*, Jakarta: Senawangi.

Seno Sastroamidjojo, 1964, *Remungan tentang Pertunjukan Wayang Kulit*, Jakarta  
Kinta

Soediro Satoto, 1999, "*Manifes Politik, Politik Sebagai Panglima Versus Manifes  
Kebudayaan*", dalam *Gelar*, Vol 2 No 1, Surakarta: STSI Press.

Umar Kayam, 1999, "*Seni Pertunjukan dan Sistem Kekuasaan*" dalam *Gelar*,  
Vol 2 No 1, Surakarta: STSI Press.